

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ahmad Haikal Amry

NPP. 32.0612

Asdaf Kabuapten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ahmadhaikal1702@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): North Lombok Regency is recorded to have a stunting prevalence of 18.03%, exceeding the national target of 14%, thus requiring effective policy intervention efforts. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the factors that influence the implementation of the Integrated Stunting Reduction and Prevention Acceleration Program policy, in the implementation of the Convergence Action Program by 8 OPDs in North Lombok Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. In this study, there were 12 informants consisting of the Head of Bappeda, Head of the Health Service, Head of the Stunting Task Force, Head of the Health Center, NGOs, and the Community of North Lombok Regency. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the implementation of the convergence action program by 8 OPDs in North Lombok Regency has been running quite well, as indicated by a decrease in stunting rates in 2023 of around 18.03% to 13.5% at the end of 2024, but there are still several obstacles such as suboptimal coordination between actors and limited resources. **Conclusion:** The implementation of the convergence action program in this study concluded that successful implementation requires strengthening cross-sector collaboration and increasing joint commitment from all stakeholders to reduce stunting rates in North Lombok Regency in a sustainable manner.

Keywords: Policy Implementation, Mitigation, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Lombok Utara tercatat memiliki prevalensi stunting sebesar 18,03%, melebihi target nasional 14%, sehingga memerlukan upaya intervensi kebijakan yang efektif. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi, pada pelaksanaan Program Aksi Konvergensi oleh 8 OPD di Kabupaten Lombok Utara. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini terdapat 12 informan yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satgas (satuan tugas) *Stunting*, Kepala Puskesmas, LSM, dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi program aksi konvergensi oleh 8 OPD di Kabupaten Lombok Utara telah berjalan cukup baik ditunjukkan dengan adanya penurunan angka stunting di tahun 2023 sekitar 18,03% menjadi 13,5% di akhir tahun 2024, namun masih terdapat beberapa kendala seperti koordinasi antar aktor yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program aksi konvergensi pada penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan telah dicapai di seluruh dunia dalam mengurangi kekurangan gizi kronis dan tingkat terhambatnya pertumbuhan linear pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, meskipun tingkatnya masih tetap tinggi (Vaivada, dkk. (2020: 777S-791S). Kekurangan gizi kronis dan pertumbuhan anak-anak yang terhambat di bawah usia 5 tahun disebut dengan *stunting*. *Stunting* merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang bersifat kronis dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. *Stunting* didiagnosis dengan mengukur indeks antropometri tinggi badan berdasarkan usia seseorang. *Stunting* dapat memperpendek umur seseorang jika tidak ditangani dengan serius (Utami, dkk. 2019 : 606-611). Malnutrisi terus menjadi masalah gizi global yang signifikan, dan menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Anak-anak yang menderita malnutrisi mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan teman sebayanya yang seusia (Siramaneerat, I., dkk. (2024). Pencegahan atau pengendalian *stunting* penting dilakukan, karena anak yang mengalaminya akan lebih rentan terhadap penyakit dan cenderung mengalami penyakit degeneratif serta gagal tumbuh sebelum usia 12 bulan yang akan mempengaruhi tinggi badan saat dewasa (Tahangnacca, dkk. (2020: 241-245). Faktor resiko *stunting* terkait Faktor Hereditary memainkan peran utama sebanyak 80% (Ira, S. (2023). Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* nasional masih sebesar 21,6%, jauh di atas batas ambang yang ditetapkan WHO, yaitu <20% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2022). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka *stunting* juga cukup tinggi, dan secara khusus Kabupaten Lombok Utara mencatat prevalensi *stunting* sebesar 18,03% pada tahun 2023, yang berarti masih melebihi target nasional 14% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Permasalahan *stunting* di Kabupaten Lombok Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya asupan gizi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Ekayanthi dkk., 2019: 312-313), buruknya sanitasi lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan, hingga keterbatasan infrastruktur layanan dasar. Pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah penting adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, serta Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2019 dan Nomor 41 Tahun 2022 yang mendukung percepatan penanganan *stunting* di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan pengertian kebijakan publik menurut Hamdi (2014:37) yaitu kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Faktor pengaruh langsung dan tidak langsung yang

paling dominan berdasarkan koefisien jalur yaitu pengetahuan gizi Ibu yaitu 0,31 (Uliyanti, dkk. (2017).

Dalam upaya penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerapkan pendekatan *konvergensi aksi* melalui pelibatan lintas sektor dari 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun telah menunjukkan penurunan angka stunting hingga menyentuh 13,5% pada akhir 2024, berbagai tantangan dalam koordinasi, sumber daya, dan pelibatan masyarakat masih menjadi hambatan implementatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Utara, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program konvergensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan tata kelola kebijakan kesehatan berbasis kolaborasi lintas sektor, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam mendukung tercapainya target nasional percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai kebijakan dan program percepatan penurunan stunting telah dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 41 Tahun 2022, namun prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Utara masih tercatat sebesar 18,03% pada tahun 2023, yang berarti masih melebihi target nasional sebesar 14%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan capaian implementasi di tingkat daerah.

Keberhasilan konvergensi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar instansi pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan aktor non-pemerintah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara spesifik faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan stunting, baik faktor pendukung maupun penghambat, serta upaya perbaikan kebijakan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Kajian ini penting sebagai dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola implementasi di daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menurunkan prevalensi stunting.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu penelitian oleh Siti Zaleha (2021) dalam kajian *systematic review* menemukan bahwa meskipun program intervensi gizi telah dilaksanakan, masih terdapat kendala besar seperti kurangnya tenaga pelaksana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya infrastruktur pendukung. Penelitian lain oleh Nurva liza dan Chatila Maharani (2023) di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah sesuai regulasi, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Shinta Aurellia Rahmasari dan Itok Wicaksono (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup efektif karena adanya dukungan dari sisi dana dan komitmen pemerintah. Namun, permasalahan masih terjadi dalam aspek koordinasi teknis dan komunikasi lintas sektor.

Penelitian oleh Nuramalia et al. (2022) di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa peran desa sangat penting dalam pencegahan stunting, namun implementasi kebijakan belum optimal di tingkat lokal. Terakhir, Putri Wididiati (2022) yang meneliti di Kabupaten Lombok Timur menemukan bahwa walaupun program berjalan baik, terdapat kendala pada kualitas SDM, komunikasi, dan lingkungan sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam mengangkat isu implementasi kebijakan penanggulangan stunting dengan pendekatan kualitatif. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian, yakni analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan melalui pendekatan aksi konvergensi oleh delapan OPD di Kabupaten Lombok Utara, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas kebijakan stunting di tingkat daerah dengan pendekatan lintas sektor.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurva Liza dan Chatila Maharani (2023) berjudul "*Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes*". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes, dan menyoroti efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun kebaruan ilmiah (novelty) dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Nurva Liza dan Chatila Maharani terletak pada beberapa aspek yaitu, Lokus Penelitian, Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi aksi konvergensi oleh 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan penelitian ini menggunakan teori yang berbeda yaitu teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

1.5 Tujuan

Mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan stunting dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan, serta mengetahui upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan masalah di lapangan secara menyeluruh dengan menggunakan fakta dan data (Simangunsong, 2017). Menurut Nurdin & Hartati (2019: 42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting melalui Program Aksi Konvergensi yang dilaksanakan oleh delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan realitas sosial dan kompleksitas kebijakan yang diterapkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait pelaksanaan kebijakan. Informan penelitian terdiri dari 12 orang, yang meliputi Kepala

Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Satgas Stunting, Kepala Puskesmas, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, guna membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sudut pandang dan teknik pengumpulan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di wilayah NTB, dengan angka mencapai 18,03% pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan selama periode waktu yang menyesuaikan dengan jadwal akademik IPDN Tahun Akademik 2024/2025 yang berlangsung dari tanggal 6 Januari sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.1.1. Standar dan Tujuan Kebijakan

3.1.1.1. Pemahaman Program

Dalam proses pemahaman program dari masing-masing aktor yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Stunting di KLU diwajibkan memiliki pemahaman terhadap program yang ada agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga permasalahan tersebut dapat di atasi dengan cepat. Wawancara di Bappeda memfokuskan pada peran lembaga sebagai coordinator dalam penanggulangan stunting di wilayah tersebut .Lalu Dinas Kesehatan dalam programnya aktif untuk memantau pelaksanaan program melalui kerja sama dengan pihak puskesmas dan posyandu sehingga program berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya bagi para petugas penanggulan stunting pemahaman terhadap tugas menjadi kunci bagi petugas untuk mengintervensi sasaran dengan tepat agar dapat dijalankan secara efektif dan terintegrasi untuk mendukung upaya dalam mencapai target penurunan stunting.

3.1.1.2 Pelaksanaan dan tujuan program kebijakan

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu utamanya untuk menurunkan angka *stunting* yang ada di klu selanjutnya yaitu mensosialisasikan apa itu *stunting* sehingga masyarakat mengerti apa yang di maksud dari *stunting* tersebut agar masyarakat tidak memandang *stunting* sebagai aib di kalangan mereka.

3.1.2. Sumber Daya

3.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Partisipasi masyarakat dalam upaya penurunan angka *stunting* di wilayah KLU merupakan hal yang sangat krusial, di mana sumber daya manusia local di sana dapat berperan aktif dalam mendukung kinerja petugas kesehatan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan biaya, semangat dan partisipasi masyarakat

tetap menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan program pemerintah, hal-hal yang menjadi hambatan dapat ditangani dengan adanya keterlibatan masyarakat. Adapun dukungan dari relawan kesehatan dan kolaborasi antara masyarakat dan petugas kesehatan dapat mempercepat penanganan masalah ini, hal ini menunjukkan sumber daya manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, keberhasilan program juga tidak bisa bergantung pada sumber daya manusia saja tetapi diperlukan dana untuk menunjang hal-hal lain yang dibutuhkan saat pelaksanaan di lapangan.

3.1.2.2. Sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program

Dalam penanganan *stunting* pemerintah mengandalkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini diperuntukkan untuk program perbaikan gizi ibu dan anak, peningkatan sanitasi, serta edukasi kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan makanan bergizi dan susu bagi masyarakat yang mengalami *stunting* di KLU dari anggaran yang digunakan secara efektif. Selanjutnya pemerintah juga berfokus pada operasionalisasi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *stunting* dan akses air bersih, mengingat masih banyak warga yang masih mengonsumsi air mentah di daerah tersebut. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik dapat menjadi kunci dalam peningkatan kesehatan dan mengatasi permasalahan ini.

3.1.3. Komunikasi Antar Organisasi

3.1.3.1. Koordinasi antar pelaksana program

Dalam pelaksanaan penanganan *stunting* ini koordinasi dari tiap OPD sangatlah penting, hal ini dikarenakan untuk memastikan program-program yang dilakukan oleh masing-masing OPD berjalan dengan lancar dan baik atau justru malah sebaliknya yang terdapat berbagai hambatan. Dengan adanya partisipasi dan kesadaran dari tiap OPD dapat menjadikan implementasi tersebut berjalan dengan optimal, Selain itu, dari puskesmas yang bekerja sama dengan posyandu yang turun langsung ke lapangan dapat memberikan data yang akurat terkait warga yang terkena *stunting*. Koordinasi dari OPD, puskesmas, posyandu, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menurunkan angka *stunting* secara efektif.

3.1.3.2. Ketaatan Para Pelaksana

Ketaatan para pelaksana merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketidaktaatan dapat menimbulkan permasalahan dalam program, sehingga koordinasi antar OPD menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sinkronisasi antar OPD juga sudah dinilai baik, dapat dilihat dari kolaborasi yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Rapat juga dapat menjadi forum dalam menyinkronkan berbagai pendapat ataupun hasil yang telah dicapai dari masing-masing OPD. Dengan adanya sinkronisasi yang baik dan ketaatan program pelaksanaan program dapat dipantau secara efektif sehingga dapat

berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Dengan demikian, ketaatan dan koordinasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan yang ada.

3.1.3.3. Kedisiplinan para pelaksana

Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dengan adanya kerja sama dari 8 OPD yang mana masing-masing dari OPD tersebut melakukan koordinasi dan sinkronisasi program untuk memastikan program tersebut berjalan tepat waktu. Evaluasi dan monitoring yang rutin dilakukan oleh tiap OPD untuk meminimalisir terjadinya kendala dan hambatan pada saat implementasi berlangsung. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan terarah, langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tepat dalam menangani masalah *stunting* di wilayah tersebut.

3.1.4. Karakteristik Agen Pelaksana

3.1.4.1. Konsistensi Pelaksana

Pemerintah sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Selain itu, dengan adanya koordinasi dari berbagai OPD yang ada dapat membuat pelaksanaan program semakin terencana dan hal itu juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah yang tepat terkait penyelesaian permasalahan yang ada di wilayah tersebut dan juga mencerminkan komitmen dari para aktor untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang menderita *stunting*.

3.1.4.2. Komunikasi antar pelaksana

Para aktor telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam pelaksanaan implementasi. Dengan adanya tujuan bersama, para aktor dapat menangani kasus *stunting* yang ada di wilayah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan *stunting*.

3.1.5. Sikap Para Pelaksana

3.1.5.1. Pemahaman Posisi

Pemahaman posisi menjadi hal yang sangat penting karena hal ini merupakan jembatan untuk saling berkoordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman yang baik dapat berkontribusi terhadap penurunan kasus yang ada di KLU menunjukkan bahwa para pelaksana paham terhadap perannya masing-masing. Dengan demikian, upaya untuk terus berkoordinasi dan mencegah kesalahpahaman merupakan suatu hal yang sangat penting agar bisa dengan baik dan bersama-sama menurunkan kasus *stunting* yang ada di KLU ini.

3.1.5.2. Respon dan Sikap para pelaksana

Respon para pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun yang mana data pada tahun 2022 ke tahun 2024 turun sebesar 9,4%. Selanjutnya, peran dari para relawan juga sangat

mempengaruhi penurunan kasus ini karena mereka turun langsung ke lapangan untuk mengontrol secara langsung kondisi masyarakat yang ada disana.

3.1.6. Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Sosial

3.1.6.1. Pengaruh sosial ekonomi

Pemerintah sendiri sudah membuat langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan yang ada di wilayah KLU. Selain itu, pemerintah juga menekan agar lonjakan harga bahan pokok tidak naik. Selanjutnya untuk masyarakat sendiri mendapat bantuan tambahan dari pemerintah tetapi untuk akses agar mendapat bantuan tersebut dinilai lumayan sulit untuk mendapatkannya.

3.1.6.2. Sumber Daya Ekonomi

Keadaan ekonomi sendiri masih kurang baik, hal itu dikarenakan masih bergantungnya masyarakat dengan bantuan dari pemerintah, bisa dikatakan bahwa masyarakat disana belum mandiri untuk menjalani kehidupannya. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh karena untuk membantu jalannya program ini diperlukan adanya makanan dan gizi yang baik, yang mana masyarakat sendiri belum bisa memenuhi hal tersebut.

3.1.6.3. Respon Masyarakat

Komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya penurunan kasus *stunting* dari tahun ke tahun yang menggambarkan kalau pemerintah berhasil dalam mensosialisasikan bahayanya *stunting*. Selain itu, untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri terdapat permasalahan berupa sulitnya bantuan tersebut untuk di akses yang membuat masyarakat tidak mau mengambil bantuan tersebut.

3.2 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Program Aksi Konvergensi

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satunya adalah sulitnya akses masyarakat untuk memperoleh bantuan pemerintah, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, regulasi di tingkat desa yang belum seragam menyebabkan perbedaan pelaksanaan program antarwilayah. Secara sosial budaya, masih kuatnya kepercayaan terhadap mitos yang membatasi konsumsi makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak, serta praktik pernikahan anak usia dini, turut memperburuk kondisi kesehatan ibu dan anak yang rentan terhadap *stunting*.

Di sisi lain, minimnya fasilitas kesehatan dan akses air bersih di sebagian besar rumah tangga menjadi kendala dalam menjaga kebersihan dan mendukung tumbuh kembang anak. Penyaluran bantuan pemerintah juga belum sepenuhnya tepat sasaran, karena masih ada warga yang terdampak *stunting* namun tidak terdata, sementara sebagian penerima justru tidak sesuai kriteria. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pola asuh, gizi, dan perawatan anak turut menjadi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan lintas sektor yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting melalui Program Aksi Konvergensi oleh delapan OPD di Kabupaten Lombok Utara berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, dan sosial budaya. Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil kajian systematic review oleh Siti Zaleha (2021), yang menyebutkan bahwa implementasi program gizi di berbagai daerah menghadapi kendala utama seperti keterbatasan tenaga pelaksana, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gizi, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Penelitian ini memiliki kemiripan dalam hal ditemukannya tantangan serupa, seperti sulitnya akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan dasar di beberapa wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Jika dibandingkan dengan penelitian Nurva Liza dan Chatila Maharani (2023) di Kabupaten Brebes, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah mengacu pada regulasi yang ada, namun koordinasi antarinstansi masih belum berjalan optimal. Hal yang serupa ditemukan dalam penelitian Shinta Aurellia Rahmasari dan Itok Wicaksono (2022), di mana dukungan dana dan komitmen pemerintah daerah sudah tersedia, tetapi masih terkendala oleh lemahnya komunikasi teknis dan kolaborasi lintas sektor. Temuan di Kabupaten Lombok Utara memperkuat hal tersebut, khususnya dalam hal belum meratanya pemahaman antar OPD terkait peran masing-masing dalam aksi konvergensi.

Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan temuan Nuramalia et al. (2022) di Kabupaten Ciamis, yang menekankan pentingnya peran desa dalam pencegahan stunting. Namun, sebagaimana terjadi di Lombok Utara, regulasi antar desa masih bervariasi dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan program belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian Putri Wididiati (2022) di Kabupaten Lombok Timur, penelitian ini mengonfirmasi bahwa faktor sosial budaya seperti mitos makanan pantangan, pernikahan usia dini, serta pola asuh yang kurang mendukung, masih menjadi hambatan besar dalam upaya menurunkan angka stunting.

Ciri khas utama dengan penelitian saya adalah fokus yang lebih mendalam pada pelaksanaan aksi konvergensi lintas OPD secara terstruktur dan evaluatif, dengan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk menilai enam variabel kunci implementasi kebijakan. Dengan demikian, selain memperkuat temuan sebelumnya, penelitian ini juga menghadirkan kontribusi ilmiah baru dalam konteks pelaksanaan kebijakan stunting berbasis kolaborasi lintas sektor di tingkat kabupaten.

IV. KESIMPULAN

Penelitian terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan telah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis menggunakan enam dimensi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. **Keterbatasan Penelitian.** Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa hambatan, di antaranya keterbatasan waktu untuk melakukan observasi secara mendalam di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, serta kesulitan dalam menjadwalkan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki keterbatasan waktu. Selain itu, peneliti juga mengalami kendala dalam memperoleh data dokumentasi resmi yang lengkap dari instansi terkait, terutama data internal yang bersifat terbatas aksesnya serta penggunaan bahasa daerah dari informan yang sulit untuk dipahami.

Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan komunikasi yang persuasif kepada narasumber serta penggunaan triangulasi data untuk menjaga keabsahan hasil penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Masih ditemukan beberapa kendala dalam penelitian ini seperti kondisi ekonomi keluarga sasaran dan keterbatasan pemahaman sasaran. Penelitian selanjutnya, disarankan dapat melakukan pendalaman terhadap peran aktor non-pemerintah dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan kader posyandu, guna melihat kontribusi mereka dalam mendukung program konvergensi secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada tingkat desa sebagai unit terkecil pelaksana program, untuk mengkaji bagaimana kapasitas kelembagaan, peraturan desa, serta partisipasi masyarakat lokal memengaruhi keberhasilan intervensi stunting. Mengingat pentingnya dimensi sosial budaya, disarankan pula agar penelitian ke depan mengangkat aspek kearifan lokal, kepercayaan masyarakat, dan pola asuh keluarga dalam mencegah stunting, yang selama ini masih menjadi tantangan dalam proses implementasi kebijakan. Terakhir, pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* juga dapat digunakan untuk melengkapi temuan kualitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbasis data statistik terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan informasi, pandangan, dan pengalaman yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Satgas Stunting, Kepala Puskesmas, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang telah menjadi bagian penting dalam memberikan data dan wawasan yang relevan bagi kelancaran penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerja sama dari seluruh informan, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang setimpal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ekayanthi dkk. (2019), Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil, *Jurnal Kesehatan*, 2019, hal 312-313. <https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1389>.
- Ira, S. (2023). Studi Kejadian Stunting pada Anak yang Ditinjau dari Aspek Biologi Molekuler: Literature Review. <https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/heme/article/view/1285>
- Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muclhlis. (2014). *Kebijakan Pubulik*. Kota Ghalia Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id>

- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan *Stunting* : Studi Kasus di Kabupaten Brebes. (Skripsi Sarjana). <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/81342>
- Nuramalia, dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* oleh desa saguling kecamatan baregbeg Kabupaten Ciamis. (Skripsi Sarjana). <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1089>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Upaya Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi
- Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Rahmasari, S. A. & Wicaksono, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di kabupaten Jember dalam upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals. (Skripsi Sarjana). <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3763857>.
- Siramaneerat, I., dkk. (2024). Mengkaji faktor penentu *stunting* pada masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia: analisis multilevel menggunakan survei kehidupan keluarga berbasis populasi (IFLS). <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18824-z>.
- Survey Kesehatan Indonesia. (2022). Prevalensi *Stunting* Indonesia
- Tahangnacca, M., dkk. (2020). *Model of stunting determinants: A systematic review*, 30(4), 241-245. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.076>.
- Uliyanti, dkk. (2017). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 24-59 Bulan, 3(2). <https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK/article/view/107>.
- Utami, R. A., Setiawan, A., Fitriyani, P. (2019). *Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia*, 29(2), 606-611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
- Vaivada, T., dkk. (2020). *Stunting* pada anak: gambaran umum beban global, tren, faktor penentu, dan pendorong kemunduran, 112(2), 777S-791S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa159>.
- Meter, D. V., Horn, C. E. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.
- Wididiati, P. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Lombok Timur. (Skripsi Sarjana). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/36183>

Zaleha, S. (2021). Implementasi Program Stunting di Indonesia : Systematic Review. (Skripsi Sarjana).

https://www.researchgate.net/publication/361745598_IMPLEMENTATION_OF_STUNTING_PROGRAM_IN_INDONESIA_A_NARRATIVE_REVIEW

